



RENCANA KERJA TAHUN 2023

RANCANGAN AKHIR

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud	6
1.4 Tujuan	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V. PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tabel Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 -2023.....	1
Tabel 2.1	: Tabel Realisasi Kegiatan	10
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Indragiri Hilir	15
Tabel 2.3	: Tabel Indikator Capaian Kinerja	16
Tabel 2.4	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	17
Tabel 2.5	: Permasalahan dan Hambatan.....	18
Tabel 2.6	: Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23
Tabel 2.7	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir.....	30
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023.....	32
Tabel 3.2	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir	35
Tabel 4.1	: Rencana Kerja Tahun 2023	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun akhir masa jabatan Bupati Indragiri Hilir periode Tahun 2019 – 2023, dimasa akhir jabatan Bupati Indragiri Hilir ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang masih menjadi hutang kinerja Bupati Indragiri Hilir sebagaimana yang telah direncanakan diawal periode jabatannya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 dan ditindaklanjuti selanjutnya melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir berperan aktif serta bertanggungjawab dalam menjalankan misi bupati indragiri hilir untuk misi ke 8 yaitu **“MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS SEKTOR UNGGULAN”** dengan indikator kinerja berupa “ Realisasi investasi (Milyar Rp)”, berdasarkan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2023

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai AKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Kab Inhil	Nilai AKIP PD (Predikat)	B	B	B	B	BB
3	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	29.2	4,400	1,889	3,991	4,390
4	Meningkatnya Aktifitas Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	0.385	448.5	1,855	1,000	1,100
		Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	28.8	3.951	33.8	2,991	3,290
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3.25	3.50	3.64	3.70	3.80

Berdasarkan tabel diatas realisasi investasi Kabupaten Indragiri Hilir berfluktuasi naik turun, hal ini terjadi dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) hal ini berdampak pada belum tercatat seluruhnya nilai investasi yang diinvestasikan oleh pelaku usaha pada perusahaannya yang berada di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Masih terbatasnya kegiatan fasilitasi penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia dan Pandemi Covid 19 yang belum berakhir.
3. Kurangnya kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan ditambah lagi Pandemi covid 19 yang membatasi ruang gerak kegiatan promosi.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana promosi menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan kreatifitas sumber daya manusia guna mencari alternatif kegiatan promosi yang terbatas selama masa pandemi covid 19.

Selain hal tersebut, permasalahan yang dihadapi dewasa ini oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir dan Dokumen Peta Potensi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi dasar dalam mengatur strategi dan kebijakan bagi daerah untuk meningkatkan aktifitas penanaman modal.
2. Belum seluruhnya peraturan daerah/peraturan kepala daerah bidang perizinan dan non perizinan yang dapat disediakan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
3. Masih kurangnya kompetensi SDM yang dimiliki saat ini, yang berdampak pada berkurangnya penilaian kinerja untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Masih lemahnya pengawasan perizinan yang dilakukan saat ini, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan layanan perizinan dan non perizinan sehingga pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien.
6. Perlunya peningkatan layanan pengaduan perizinan sehingga dapat memenuhi standarisasi pelayanan publik.

7. Persiapan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir selaku penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, guna menjawab segala permasalahan yang ada tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu dan evaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan.
3. Pelaksanaan Forum
4. Penetapan Rencana Kerja
5. Tahapan selanjutnya setelah penetapan Rencana Kerja maka dokumen Rencana Kerja dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Selain sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 juga dimaksudkan untuk mencapai target kinerja optimal RENSTRA dan RPJMD kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan. Selain itu, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir akan digunakan sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021, untuk mengetahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan penanaman modal tahun anggaran 2021 masih terdapat kekurangan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan beberapa evaluasi pelaksanaan kegiatan di kategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Target kinerja atau hasil keluaran pada tahun 2021 terealisasi seluruhnya atau tidak ada program kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja hasil keluarannya namun apabila dilihat dari kebutuhan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Target yang terealisasi seluruhnya tersebut belumlah mencukupi / memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada tahun berkenaan.

2. Realisasi Program Kegiatan Lainnya yang Telah memenuhi target Kinerja hasil keluaran yang direncanakan.

Realisasi target program kegiatan lainnya yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel .01 terlampir:

Tabel 2.1. Tabel Realisasi Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.018.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.018.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	40,00	70,00	57,87	82,67%	80	60	75,00%
2.018.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	100,00	60,00	60,00	100%	80	60	75,00%
2.018.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	7	7	100%	7	5	71,43%
2.018.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	60,00	60,00	100%	80	75,00	93,75%
2.018.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	396	396	396	396	100%	396	297	75,00%
2.018.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	51	-	-	0	0	23	0%	0,00%
2.018.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	18	-	-	0	0	2	0	0,00%

2.018.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	100,00	60,00	53,33	89%	80	53,33	66,66%
2.018.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	4	31,00	31	100%	47	10	21,28%
2.018.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	3	2.426	2.426	100%	3	2	66,67%
2.018.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	30.043	30.043	100%	2	1	50,00%
2.018.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	125	125	110	110	100%	111	100	90,09%
2.018.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	100	60,00	60,00	100%	80	60,00	75,00%
2.018.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	100	100	1.020	1.020	100%	100	90	90,00%
2.018.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	3	3	100%	3	2	66,67%
2.018.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	444	444	396	396	100%	444	333	75,00%
2.018.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	60	50,00	60,00	56,00	93%	80	60,00	75,00%
2.018.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	22	22	22	100%	6	4	66,67%
2.018.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	33	17	74	74	100%	33	20	60,61%

2.018.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	93	93	93	100,00%	93	80	86,02%
2.018.03.02.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan	2	1	1	1	100%	1	1	100,00%
2.018.03.02.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Kali	2	1	1	1	100%	1	1	100,00%
2.018.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Predikat	3.80	3.50	3,64	3,64	100%	3,70	3,70	100%
2.018.04.02.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pelayanan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	3	2	1	1	100%	3	2	66,67%
2.018.04.02.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu satu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	575	575	575	575	100%	575	500	86,96%
2.018.04.02.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan	1	1	1	1	100%	1	0	0,00%
2.018.04.02.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan tatakelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	20	-	20	20	100%	20	10	50,00%

2.018.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha</i>	Persen	80	60	65	65,00	100%	70	60	86%
2.018.05.02.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terlaksana	Kegiatan	3	2	3	3	100%	3	3	100,00%
2.018.05.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha	3	3	6	6	100%	3	2	100,00
2.018.05.02.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha	40	-	182	182	100%	40	20	100,00
2.018.05.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Pelaku Usaha	3	3	3	3	100%	3	2	100,00
2.018.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	Nilai	3.00	2.50	2,60	2,60	100%	2,70	2,70	100%
2.018.06.02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	1	1	1	100%	1	1	100,00%
2.018.03.02.01.02	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Kali	1	1	1	1	100%	1	1	100,00

3. Realisasi program yang melebihi target kinerja

Tidak terdapat program kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target, kinerja program / kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target, kinerja program / kegiatan atas program ini di karenakan anggaran yang tersedia masih dapat memenuhi pembiayaan atas kegiatan dimaksud dengan pertimbangan kebutuhan yang mendesak.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah

Implikasi yang timbul terhadap target kinerja program pemerintah pada tahun anggaran 2021 belumlah melebihi dari target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan target kinerja anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran APBD masih dibawah target renstra berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran atas kondisi yang dihadapi pada tahun 2021 tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun rencana kerja tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP selalu menyampaikan rencana kerja setiap tahunnya kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kebutuhan anggaran sebagai mana yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir serta mempertimbangkan atas permasalahan lainnya yang terjadi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan bidang penanaman modal setiap tahunnya.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 Kabupaten Indragiri Hilir.

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					Urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
2	18				Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
2	18	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota									
2	18	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
2	18	01	2.01	06	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	7 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	71,43	7 Laporan	5 Laporan	71
2	18	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah									
2	18	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	6 Bulan	600
2	18	01	2.06		Administrtasi umum perangkat daerah									
2	18	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	32 Jenis	31 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100,00	34 Jenis	30 Jenis	88
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	3 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100,00	126 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0
					Jumlah logistik yang disediakan	4029 Liter	3885 Liter	4029 Liter	4029 Liter	100,00	1 Tahun	6 Bulan	600	600
					Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1366 Porsi	1254 Porsi	1366 Porsi	1366 Porsi	100,00	400 Porsi	400 Porsi	100	100
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan	16500 Lembar	16320 Lembar	16500 Lembar	16500 Lembar	100,00	3 Jenis	1 Jenis	33
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	11 Kali	0 Kali	11 Kali	0 Kali	0,00	0 kali	0 kali	0
					Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	51 Kali	103 Kali	51 Kali	51 Kali	100,00	66 Kali	60 Kali	91	91
2	18	01	2.08		Penunjang urusan pemerintahan daerah									
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terlayani	1020 Lembar	1020 Lembar	1020 Lembar	1020 Lembar	100,00	420 Buah	400 Lembar	95
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100,00	3 Jenis	3 Jenis	100
2	18	01	2.08	04	Penyediaan jasa layanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi / teknis yang dibayarkan	45 Orang	31 Orang	45 Orang	45 Orang	100,00	33 Orang	33 Orang	100
					Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	60 Orang	4 Orang	60 Orang	60 Orang	100,00	4 Orang	4 Orang	100	100
2	18	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
2	18	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara diperpanjang perizinannya	22 Unit	17 Unit	22 Unit	22 Unit	100,00	15 Unit	1 Unit	7
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	5 Unit	17 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00	5 Unit	4 Unit	80
2	18	03			Program Promosi Penanaman modal	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja (Komputer/laptop/AC)	74 kali	7 kali	74 kali	74 kali	100,00	20 Unit	15 unit	75
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota									
2	18	03	2.01	02	pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota	Jumlah pameran investasi yang diikuti / dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00	1 Kali	0 Kali	0
2	18	04			Program pelayanan penanaman modal	Jumlah sarana promosi penanaman modal	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!
2	18	04	2.01		Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota									
2	18	04	2.01	01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen data perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!
					Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan secara online	23 Jenis	0 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	100,00	575 Dokumen	250 Dokumen	43,48	43,48
2	18	04	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah unit perizinan tertentu yang dimonitoring	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100,00	6 Unit	2 Unit	33,33
2	18	05			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal									
2	18	05	2.01		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota									
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan optimalisasi koordinasi tim teknis perizinan dan non perizinan	550 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!
					Jumlah unit usaha yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	3 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	2 Unit	66,67	66,67
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	182 Unit	0 Unit	182 Unit	182 Unit	100,00	42 Unit	0 Unit	0
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	3 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	0 Unit	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan berdasarkan indikator kinerja kunci yang menjadi tugas utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Capaian Kinerja tersebut dalam ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Tabel Indikator Capaian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai AKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Kab Inhil	Nilai AKIP PD (Predikat)	B	B	B	B	BB
3	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	29.2	4,400	1,889	3,991	4,390
4	Meningkatnya Aktifitas Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	0.385	448.5	1,855	1,000	1,100
		Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	28.8	3.951	33.8	2,991	3,290
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3.25	3.50	3.64	3.70	3.80

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun* 2022	Tahun** 2023	Tahun*** 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				((7)				(8)
1	Nilai AKIP	Predikat	-		B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	
2	Nilai AKIP PD	Predikat	-		B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	
3	Realisasi Investasi	Milyar Rp	-		1.889	3.991	4.390	4.829	1.889	13.000	4.390	4.829	
4	Realisasi Investasi PMDN	Milyar Rp	-		1.855	1.000	1.100	1.200	1.855	1.000	1.100	1.200	
5	Realisasi Investasi PMA	Milyar Rp	-		33,80	2.991	3.290	3.629	33,80	2.991	3.290	3.629	
6	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	-		3,64	3,70	3,80	3,90	3,64	3,70	3,80	3,90	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir terkait pelayanan berpedoman dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur lingkup tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah urusan penanaman modal. Selanjutnya dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait koordinasi dalam program dan kegiatan investasi daerah dan promosi daerah, begitu pula dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia melalui kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Nilai Realisasi Investasi Belum maksimal	Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah	- Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir - Masih kurangnya Kajian berkenaan dengan Potensi dan Produk Unggulan Daerah - Belum tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Indragiri Hilir - Belum adanya Dokumen peta potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal daerah - Masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sehingga sulit diketahui realisasi investasi - Masih kurangnya terjalin Kerjasama kemitraan antara Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro - Masih kurangnya pelaksanaan pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal - Belum maksimalnya kegiatan

			pengendalian penanaman modal (Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan) - Terbatasnya kegiatan promosi daerah yang dapat diikuti melalui event regional dan nasional - Terbatasnya sarana dan prasarana promosi daerah - Masih kurangnya pengembangan promosi melalui media cetak/massa maupun elektronik - Terbatasnya materi pameran bagi UMKM baik kuantitas maupun kualitas untuk dipromosikan
		Kualitas Pelayanan perizinan belum maksimal	- Belum maksimalnya penyesuaian terhadap regulasi yang ada terkait perizinan dan non perizinan Perda, Perbup, dan SOP). - Terlalu banyak persyaratan dari Dinas teknis yang dipersyaratkan pada pemohon perizinan. - Koordinasi dengan Instansi Teknis terlalu lama dalam memberikan pertimbangan Teknis - Tim Teknis masih berada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan belum berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir - Belum tersusunnya data perizinan secara baik - Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pelayanan perizinan. - Belum maksimalnya survey terhadap pemohon perizinan - Belum maksimalnya monitoring terhadap penerbitan perizinan - Belum optimalnya sarana dan prasarana teknologi informasi pelayanan perizinan secara online - Belum adanya SDM yang Menguasai Teknologi Sistem Informasi pelayanan perizinan secara baik - Belum lengkapnya ketersediaan fasilitas pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan (Telepon, SMS, kotak saran dll). - Belum maksimalnya pelaksanaan penilaian indeks kepuasan masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir berperan dalam menjalankan Visi dan Misi Bupati Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Misi ke-8 yaitu **“MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH”**, hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai investasi daerah setiap tahunnya yang berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Provinsi Riau dan Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Adapun Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan pelayanan Penanaman Modal antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Peluang untuk menarik masuknya investor terutama di sektor industri hilir kelapa mengingat Indragiri Hilir merupakan daerah dengan hamparan kelapa terluas di dunia;
- b. Peluang melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan harga jual kelapa, terutama dengan melakukan kerjasama dan kemitraan maupun mencari peluang-peluang baru pemasaran produk kelapa di dalam maupun luar di luar negeri mengingat Kabupaten Indragiri Hilir berada dekat dengan jalur lintas perdagangan dunia terutama Singapura dan Malaysia;
- c. Peluang untuk menggali, mengembangkan dan mempromosikan berbagai potensi daerah karena masih banyak tersedia potensi unggulan yang belum mampu bersaing di pasar global
- d. Peluang untuk melakukan penyederhanaan dan penerapan system Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui penerapan Teknologi Informasi untuk memudahkan masyarakat dunia usaha dalam melakukan pengurusan perizinan
- e. Peluang terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan penanaman modal yang akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan kegiatan perekonomian masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan tugas pokok dan fungsi antara lain adalah :

- a. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sebagai perwujudan good governance
- a. Masih ada sebagian besar masyarakat dunia usaha yang belum memiliki legalitas perizinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Masih Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal
- c. Tuntutan terhadap pengembangan dan promosi potensi unggulan daerah karena masih banyak potensi unggulan daerah yang belum mampu bersaing di pasar global.
- d. Tuntutan terhadap ketersediaan sarana dan sarana pendukung pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- e. Reformasi birokrasi yang menuntut adanya aparatur yang trampil, jujur, profesional dan bebas KKN dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima.

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir dan Dokumen Peta Potensi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi dasar dalam mengatur strategi dan kebijakan bagi daerah untuk meningkatkan aktifitas penanaman modal.
2. Belum seluruhnya peraturan daerah/peraturan kepala daerah bidang perizinan dan non perizinan yang dapat disediakan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
3. Masih kurangnya kompetensi SDM yang dimiliki saat ini, yang berdampak pada berkurangnya penilaian kinerja untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Masih lemahnya pengawasan perizinan yang dilakukan saat ini, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan layanan perizinan dan non perizinan sehingga pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien.
6. Perlunya peningkatan layanan pengaduan perizinan sehingga dapat memenuhi standarisasi pelayanan publik.
7. Persiapan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir selaku penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan rancangan awal RKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023, selanjutnya melakukan analisa kebutuhan berdasarkan target kinerja yang diharapkan pada Tahun 2023 agar pelayanan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan permasalahan dapat segera diselesaikan serta tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Analisa kebutuhan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program kegiatan sub kegiatan ini dilakukan dikarenakan berkembangnya isu strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi yang perlu segera ditindaklanjuti, sementara alokasi anggaran yang dirumuskan dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dinilai belum mencukupi dan atau melebihi dari target kinerja yang diharapkan pada indikator kinerja yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut maka dilakukan reviu rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6.Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	7.632.424.264	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	9.866.817.028			
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	120.000.000	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	300.879.250			
		1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	120.000.000		1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	300.879.250	
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	4.655.924.264	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	5.143.136.926			
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	4.655.924.264		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	5.143.136.926	

		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	51	380.000.000		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	51	337.448.000	
		1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	380.000.000		1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	337.448.000	
		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.131.000.000		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.957.813.252	
		1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	231.000.000		1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	790.798.200	
		1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	200.000.000		1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	168.232.052	
		1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	70.000.000		1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	70.000.000	
		1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	630.000.000		1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	928.783.000	

		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	1.125.500.000		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	1.851.289.600	
		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	5.500.000		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	9.000.000	
		1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	600.000.000		1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	858.000.000	
		1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	37	520.000.000		1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	37	984.289.600	
		1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	220.000.000		1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	276.250.000	
		1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	170.000.000		1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	178.000.000	
		1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	33	50.000.000		1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	33	98.250.000	

2	2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	323.000.000	2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	548.062.000			
		2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan	2	323.000.000	2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan	2	548.062.000			
			2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	323.000.000			2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	548.062.000	
3	3.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Huruf	A	1.911.000.000	3.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Huruf	A	1.385.272.500			
		3.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal yang terlaksana	Kegiatan	3	1.911.000.000	3.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal yang terlaksana	Kegiatan	3	1.385.272.500			
			3.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	575	1.103.000.000			3.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	575	921.360.500	

			3.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan	1	499.000.000			3.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan	1	355.162.000	
			3.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	20	309.000.000			3.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	20	108.750.000	
4	4.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf	A	57.000.000	4.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf	A	824.005.100	
		4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	57.000.000		4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	824.005.100	
			4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kegiatan	1	57.000.000			4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kegiatan	1	824.005.100	

4	4.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf	A	57.000.000	4.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf	A	824.005.100	
	4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	57.000.000	4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	824.005.100	
	4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kegiatan	1	57.000.000	4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kegiatan	1	824.005.100	
5	5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Indragiri Hilir	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	80	517.000.000	5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Indragiri Hilir	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	80	317.027.500	
	5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	3	517.000.000	5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	3	317.027.500	
	5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan	3	31.000.000	5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan	3	115.247.500	

			5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	40	299.000.000			5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	40	85.000.000	
			5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan	3	187.000.000			5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan	3	116.780.000	
6	6.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Kabupaten Indragiri Hilir	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	70	1.150.000.000	6.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Kabupaten Indragiri Hilir	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	70	1.421.685.200	
		6.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan fasilitas/insentif penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	330.000.000	6.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah kegiatan fasilitas/insentif penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	591.340.000		
		6.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	330.000.000		6.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	591.340.000	
		6.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Indragiri Hilir yang tersedia	Dokumen	2	820.000.000	6.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Indragiri Hilir yang tersedia	Dokumen	2	830.345.200		
		6.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	430.000.000		6.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	435.445.100	
		6.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	390.000.000		6.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	394.900.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri dalam penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dalam mendukung kebijakan pelayanan publik telah menetapkan rencana program utama sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hilir belum terdapat usulan secara spesifik yang dimintakan langsung oleh masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, untuk itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan peraturan perundang-undang lainnya serta dapat memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana mestinya.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Satuan (5)	Besaran/Volume (6)	Catatan (7)
		NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN:

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural **PRIORITAS NASIONAL:**

PRIORITAS 1:

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PRIORITAS 2:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PRIORITAS 3:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PRIORITAS 4:

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PRIORITAS 5:

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 42

PRIORITAS 6:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PRIORITAS 7:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2022, Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 tidak mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan PTSP, maka dukungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi pelaksanaan urusan penanaman modal

dan PTSP Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 yaitu **“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”** Dinas Penanaman Modal dan PTSP(DPMPTSP) merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

- Tujuan :

Adapun tujuan utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengaktualisasi visi dan misi bupati dan wakil bupati Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah : **“MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVETASI DAERAH, DENGAN NILAI INVESTASI PMDN”**

- Sasaran :

Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten indragiri hilir dalam mengaktualisasikan visi dan misi bupati dan wakil bupati indragiri hilir tahun 2018 - 2023 adalah :

- Meningkatkan aktifitas kegiatan penanaman modal
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai AKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Kab Inhil	Nilai AKIP PD (Predikat)	B	B	B	B	BB
3	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	29.2	4,400	1,889	3,991	4,390
4	Meningkatnya Aktifitas Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	0.385	448.5	1,855	1,000	1,100
		Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	28.8	3.951	33.8	2,991	3,290
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3.25	3.50	3.64	3.70	3.80

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 dirumuskan dengan mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan target tahun anggaran 2022, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati Indragiri Hilir sebagaimana yang diuraikan pada bagian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir tersebut diatas.

Rekapitulasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 6 (Lima) Program, dan 11 (Sebelas) Kegiatan, pelaksanaan urusan penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir meliputi :

1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal, dilakukan berupa kegiatan promosi daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada calon investor dalam dan luar negeri
2. Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal, dilakukan berupa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir lingkup wilayah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal, meliputi pengawasan, pemantauan, pembinaan terhadap pelaku usaha yang terdapat di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berupa penyusunan regulasi peraturan daerah dan kepala tentang penanaman modal.
5. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota berupa penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir dan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilakukan berupa pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam upaya peningkatan pelayanan penanaman modal Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Kegiatan Pengelolaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka total kebutuhan dana/pagu indikatif program kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebesar Rp 14.362.869.328 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan sumber dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya terdapat ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya hal tersebut dimungkinkan karena adanya arah dan kebijakan yang berubah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang harus disesuaikan target kinerja dan alokasi anggarannya berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Indragiri Hilir
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.18	URUSAN PENANAMAN MODAL			Kab Indragiri Hilir		14.845.578.979				14.602.136.926
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	11.231.664.773			100	10.152.136.926
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	394.450.000			100	350.000.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	7	394.450.000			7	350.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	4.970.118.272			100	5.143.136.926
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Orang	Kab Indragiri Hilir	22	4.970.118.272			22	5.143.136.926
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Kab Indragiri Hilir	51	269.983.000			51	350.000.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Diklat	Kab Indragiri Hilir	18	269.983.000			18	350.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	3.684.823.901			100	2.100.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	Kab Indragiri Hilir	3	2.091.326.400			3	800.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	Kab Indragiri Hilir	3	261.212.500			3	200.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	Kab Indragiri Hilir	2	209.000.000			2	100.000.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	Kab Indragiri Hilir	111	1.123.285.001			111	1.000.000.000

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	1.656.289.600			100	1.909.000.000
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	7.200.000			100	9.000.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	Kab Indragiri Hilir	3	382.200.000			3	900.000.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	Kab Indragiri Hilir	37	1.266.889.600			37	1.000.000.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	256.000.000			100	300.000.000
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	Kab Indragiri Hilir	6	177.400.000			6	200.000.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Kab Indragiri Hilir	33	78.600.000			33	100.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	93	338.449.600			93	600.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	338.449.600			1	600.000.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan	Kali	Kab Indragiri Hilir	1	338.449.600			1	600.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Huruf	Kab Indragiri Hilir	A	1.270.108.100			A	1.550.000.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	3	1.270.108.100			3	1.550.000.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang terdaftar melalui sistem OSS dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI)	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	575	933.210.500			575	1.000.000.000
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring	unit	Kab Indragiri Hilir	20	249.897.600			20	400.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan	Orang	Kab Indragiri Hilir	20	87.000.000			20	150.000.000

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf	Kab Indragiri Hilir	A	559.204.100			A	1.000.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	559.204.100			1	1.000.000.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	559.204.100			1	1.000.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	Kab Indragiri Hilir	80	217.896.206			80	450.000.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	3	217.896.206			3	450.000.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pemantauan	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	3	73.774.000			3	150.000.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	40	68.000.206			40	150.000.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	3	76.122.000			3	150.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Penanaman Moda	Persen	Kab Indragiri Hilir	70	1.228.256.200			70	850.000.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitas/insentif penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	451.261.000			1	850.000.000
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Tentang Penanaman modal	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	1	451.261.000			1	600.000.000
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pemberian insentif daerah	Kali	Kab Indragiri Hilir	0	-			1	250.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Indragiri Hilir yang tersedia	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	2	776.995,200			0	-
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM/Master Plan	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	1	388.785,100			0	-
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	1	388.210,100			0	-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 4.1 : Rencana Kerja Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM KERJA/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2023			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024		
				LOKASI	TARGET	PAGU	LOKASI	TARGET	PAGU
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel		Nilai AKIP (predikat)	Predikat		A			A	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP Kab Inhil	Nilai AKIP PD (predikat)	Predikat		A			A	
Meningkatnya Nilai Investasi		Realisasi Investasi (Milyar Rp)	Milyar Rp		2.280			2.660	
	Meningkatnya Aktifitas Kegiatan Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp)	Milyar Rp		2.244			2.618	
		Realisasi Investasi PMA (Milyar Rp)	Milyar Rp		36			42	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indek Pelayanan Publik	Huruf		A			A	
2.18	URUSAN PENANAMAN MODAL			Kab Indragiri Hilir		14.845.578.979	Kab Indragiri Hilir		14.602.136.926
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	11.231.664.773	Kab Indragiri Hilir	100	10.152.136.926
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	394.450.000	Kab Indragiri Hilir	100	350.000.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	7	394.450.000	Kab Indragiri Hilir	7	350.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	4.970.118.272	Kab Indragiri Hilir	100	5.143.136.926
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Orang	Kab Indragiri Hilir	22	4.970.118.272	Kab Indragiri Hilir	22	5.143.136.926
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Kab Indragiri Hilir	51	269.983.000	Kab Indragiri Hilir	51	350.000.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Diklat	Kab Indragiri Hilir	18	269.983.000	Kab Indragiri Hilir	18	350.000.000

2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	3.684.823.901	Kab Indragiri Hilir	100	2.100.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	Kab Indragiri Hilir	3	2.091.326.400	Kab Indragiri Hilir	3	800.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	Kab Indragiri Hilir	3	261.212.500	Kab Indragiri Hilir	3	200.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	Kab Indragiri Hilir	2	209.000.000	Kab Indragiri Hilir	2	100.000.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	Kab Indragiri Hilir	111	1.123.285.001	Kab Indragiri Hilir	111	1.000.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	1.656.289.600	Kab Indragiri Hilir	100	1.909.000.000
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	7.200.000	Kab Indragiri Hilir	100	9.000.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	Kab Indragiri Hilir	3	382.200.000	Kab Indragiri Hilir	3	900.000.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	Kab Indragiri Hilir	37	1.266.889.600	Kab Indragiri Hilir	37	1.000.000.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Kab Indragiri Hilir	100	256.000.000	Kab Indragiri Hilir	100	300.000.000
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	Kab Indragiri Hilir	6	177.400.000	Kab Indragiri Hilir	6	200.000.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Kab Indragiri Hilir	33	78.600.000	Kab Indragiri Hilir	33	100.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	93	338.449.600	Kab Indragiri Hilir	93	600.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	338.449.600	Kab Indragiri Hilir	1	600.000.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan	Kali	Kab Indragiri Hilir	1	338.449.600	Kab Indragiri Hilir	1	600.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Huruf	Kab Indragiri Hilir	A	1.270.108.100	Kab Indragiri Hilir	A	1.550.000.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	3	1.270.108.100	Kab Indragiri Hilir	3	1.550.000.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang terdaftar melalui sistem OSS dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI)	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	575	933.210.500	Kab Indragiri Hilir	575	1.000.000.000

2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring	unit	Kab Indragiri Hilir	20	249.897.600	Kab Indragiri Hilir	20	400.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan	Orang	Kab Indragiri Hilir	20	87.000.000	Kab Indragiri Hilir	20	150.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf	Kab Indragiri Hilir	A	559.204.100	Kab Indragiri Hilir	A	1.000.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	559.204.100	Kab Indragiri Hilir	1	1.000.000.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	559.204.100	Kab Indragiri Hilir	1	1.000.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	Kab Indragiri Hilir	80	217.896.206	Kab Indragiri Hilir	80	450.000.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	3	217.896.206	Kab Indragiri Hilir	3	450.000.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pemantauan	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	3	73.774.000	Kab Indragiri Hilir	3	150.000.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	40	68.000.206	Kab Indragiri Hilir	40	150.000.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Pelaku Usaha	Kab Indragiri Hilir	3	76.122.000	Kab Indragiri Hilir	3	150.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Penanaman Moda	Persen	Kab Indragiri Hilir	70	1.228.256.200	Kab Indragiri Hilir	70	850.000.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitas/insentif penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	Kab Indragiri Hilir	1	451.261.000	Kab Indragiri Hilir	1	850.000.000

2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Tentang Penanaman modal	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	1	451.261.000	Kab Indragiri Hilir	1	600.000.000
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pemberian insentif daerah	Kali	Kab Indragiri Hilir	0	-	Kab Indragiri Hilir	1	250.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Indragiri Hilir yang tersedia	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	2	776.995.200	Kab Indragiri Hilir	0	-
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM/Master Plan	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	1	388.785.100	Kab Indragiri Hilir	0	-
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota	Dokumen	Kab Indragiri Hilir	1	388.210.100	Kab Indragiri Hilir	0	-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA juga berfungsi untuk menilik kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri hilir tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023.

Dengan adanya RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2023 ini. Kemudian RENJA D Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Juli 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

WIRYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620708 199003 1 006